



Kajian Fungsi Sosial Budaya, Estetika, dan Ekologi Taman “Hutan Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung

Citra Persada¹, Novia Putri², dan Dwi Bayu Prasetya³

¹Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Rajabasa, 35145

²Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365

³Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365

*E-mail korespondensi: citrapersada65@gmail.com

Abstrak. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di perkotaan makin terdesak oleh kawasan terbangun, sehingga baik secara kuantitas maupun kualitas masih belum memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas RTH publik dari aspek fungsi sosial budaya, estetika, dan ekologi Taman “Hutan Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung dari sisi pengguna dan penyedia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis faktor. Dari hasil wawancara diketahui bahwa indikator prioritas fungsi sosial budaya RTH menurut masyarakat yang paling kuat yaitu keanekaragaman plasma nutfah, fungsi estetika paling kuat yaitu sarana pendukung kreativitas dan produktivitas masyarakat dan fungsi ekologi paling kuat yaitu sumur resapan air. Pendapat stakeholder untuk optimalisasi fungsi sosial budaya, estetika, dan ekologi didapatkan dari wawancara pejabat di instansi pemerintah Kota Bandar Lampung, hasilnya adalah bahwa terdapat kendala-kendala dan fungsi RTH kota yaitu tidak jelasnya status lahan, tidak adanya sosialisasi, kurangnya konsistensi pemerintah, dan kurangnya koordinasi. Rekomendasi bagi pengambil keputusan adalah apabila pemerintah ingin merevitalisasi RTH Taman “Hutan Kota” Kota Bandar Lampung, maka hendaklah mempertimbangkan indikator prioritas dari fungsi-fungsi RTH yang menjadi temuan studi ini.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Taman Hutan Kota Way Halim, Kota Bandar Lampung, Metode Analisis Faktor.

PENDAHULUAN

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di perkotaan makin terdesak oleh kawasan terbangun, sehingga baik secara kuantitas maupun kualitas belum memadai. Ruang publik adalah suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik (Trancik, 1986). Luas RTH pada wilayah perkotaan hendaklah minimal sebesar 30 persen dari luas kota yang terinci sebesar 20 persen RTH publik dan 10 persen privat (UU No. 26 Tahun 2007). Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap fungsi-fungsi RTH ini membawa implikasi terpenuhinya ruang sebagai wadah aktivitas pengguna sesuai dengan fungsinya dan tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang (Carr, 1995). Oleh sebab itu kualitas ruang terbuka sangatlah berpengaruh terhadap RTH yang ada pada suatu kota, walaupun pada kenyataannya penyediaan RTH publik yang berkualitas sulit diterapkan karena pencapaian kebijakan terkait RTH publik tidak akan tercapai, karena banyaknya hambatan-hambatan baik yang datang dari masyarakat, instansi terkait maupun swasta (Iguh, 2014).

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah sebesar 197,22 Km² dan mempunyai jumlah penduduk sebesar 979.287 jiwa (BPS, 2017). Jumlah penduduk di perkiraan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk tersebut, pasti memerlukan kebutuhan lahan yang tidak sedikit, lambat laun RTH yang terdapat di Kota Bandar Lampung akan tersisih oleh pembangunan fisik. Keberadaan RTH yang sangat sedikit juga menjadi kendala bagi pemerintah untuk mendukung kegiatan masyarakat. Kota Bandar Lampung harus memiliki minimal 20 persen RTH dari total luas Kota Bandar Lampung. Luas RTH yang terdapat di Kota Bandar Lampung milik pemerintah hanya sebesar 33,29 Ha atau hanya sekitar 0,17 persen dari luas daerah (Program Kotaku, 2018). Padatnya penduduk di kota ini seharusnya diimbangi dengan fasilitas ruang publik yang memadai. Memasuki tahun 2014, luasan RTH mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan luas RTH ini disebabkan oleh faktor penambahan jumlah penduduk yang membutuhkan lahan untuk pembangunan tempat tinggal (Yanti, 2016). Penelitian yang dilakukan Yanti (2016) menunjukkan bahwa jika dilihat dari tiga aspek pembentuk kualitas RTH yaitu aspek kebutuhan (*needs*), pemenuhan hak (*right*) dan makna (*meaning*), maka kualitas RTH yang ada di Kota Bandar Lampung dinilai cukup, sehingga perlu penanganan lebih lanjut.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa dari sisi luas ketersediaan RTH di Kota Bandar Lampung masih kurang, begitu pula di sisi kualitas juga masih kurang, sehingga perlu disusun kebijakan untuk peningkatan kualitas RTH di Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung cukup kesulitan mencari lahan dan peningkatan kualitas RTH publik, karena ketersediaan dana yang terbatas. Banyaknya aspek yang berkaitan dengan kebijakan peningkatan kualitas RTH memerlukan informasi aspek apa yang menjadi prioritas penanganan. Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek prioritas yang perlu ditangani untuk peningkatan kualitas RTH di Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung memiliki beberapa RTH publik aktif yang setiap akhir pekan (Sabtu dan Minggu) ramai dikunjungi oleh masyarakat, diantaranya adalah Taman Hutan Kota Way Halim, Taman Lapangan Merah dan Pasar Seni, Lapangan Kalpataru, Taman Embung Sukarame, Taman Dipangga. Penelitian ini dilakukan di Taman “Hutan

Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung, karena merupakan salah satu RTH aktif skala kota, tidak pernah sepi pengunjung, lokasi yang sangat strategis dan akan direvitalisasi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif atau metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi dan diproses menggunakan *Software SPSS* (Sutrisno, 2014).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, maksud dari pengambilan secara *purposive sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Acha, 2005). Dalam penelitian ini unit analisis adalah seluruh penduduk yang berada di Kecamatan Way Halim, kemudian ditetapkan jumlah masing-masing responden yang terdapat dimasing-masing kelurahan dengan menggunakan *judgement sampling*, dimana teknik pengambilan sampel ini berdasarkan hasil observasi awal kondisi eksisting Taman “Hutan Kota” Kota Bandar Lampung dengan berbagai kriteria. Kriteria responden antara lain : responden berusia 10 - 64 tahun, responden mengetahui kondisi eksisting Taman Hutan Kota Way Halim, responden sering mengunjungi dan mengetahui keberadaan Taman “Hutan Kota” Way Halim. Untuk jumlah sampel yang akan diambil menggunakan Rumus Taro Yamane (Yamane, 1967), dan dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Sedangkan dari sisi penyedia (pemerintah Kota Bandar Lampung), wawancara dilakukan dengan metode *in depth interview*, responden berjumlah 5 dari birokrat yang terdiri dari Bappeda, Dinas Kebersihan, Kantor Kecamatan dan 5 orang dari tokoh masyarakat.

Kajian kualitas RTH dalam penelitian ini melihat 3 aspek fungsi yaitu sosial budaya, estetika dan ekologi dengan menilai masing-masing indikator pada setiap aspek (Lihat Tabel 1: Indikator Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kawasan Perkotaan). Indikator ini mangacu pada Permen 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan terdapat beberapa fungsi dan indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu fungsi sosial budaya, fungsi estetika, dan fungsi ekologi mempunyai indikator masing-masing.

Penilaian indikator prioritas untuk optimalisasi fungsi sosial budaya, estetika, dan ekologi ini didapatkan dari hasil kuesioner masyarakat dan wawancara tokoh masyarakat sebagai pengguna RTH di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Analisis kebijakan fungsi RTH publik Taman “Hutan Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis Kebijakan Fungsi RTH Publik Taman “Hutan Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung ini didapatkan dari hasil wawancara dengan instansi terkait kebijakan, dan perencanaan RTH di Kota Bandar Lampung, yang kemudian keluaran dari analisis ini berupa rekomendasi kebijakan dan perencanaan Taman “Hutan Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai profil RTH Taman “Hutan Kota” Way Halim, identifikasi indikator prioritas dari fungsi- fungsi RTH Taman “Hutan Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung, dan juga pendapat *stakeholders* untuk optimalisasi fungsi sosial budaya, estetika dan ekologi Ruang Terbuka Hijau Taman “Hutan Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung.

Kajian terhadap indikator-indikator tersebut diatas dan telah dilakukan analisis sebanyak 15 kali pengeluaran indikator yang tidak sesuai didapatkan indikator dari fungsi RTH tersebut, maka diperoleh hasil pada Tabel 2 di bawah ini.

Angka *loading factor* pada Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat korelasi antar variable prioritas berbeda-beda pada setiap fungsi. Semakin besar nilai *factor loadings* dari setiap variable berarti semakin erat tingkat korelasinya terhadap faktor yang terbentuk. Variabel yang memiliki nilai tingkat korelasi kuat adalah pada aspek fungsi sosial budaya antara lain variabel keanekaragaman plasma nutfah yaitu sebesar 77 persen, jenis pepohonan dan tanaman sebesar 70 persen, lingkungan dan bentang alam yang unik sebesar 71 persen. Selanjutnya pada aspek fungsi estetika adalah indikator dengan tingkat korelasi kuat adalah terdapat sarana pendukung kreativitas dan produktivitas masyarakat sebesar 66 persen, sedangkan pada aspek fungsi ekologi indikator dengan relasi kuat adalah sumur resapan air sebesar 73 persen. Sisanya adalah indikator dengan nilai tingkat korelasi rendah yaitu pada aspek estetika ada pada variabel ergonomis sebesar 55 persen dan variabel *design* kebudayaan lampung sebesar 51 persen.

Tabel 1. Indikator Fungsi-Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kawasan Perkotaan

Variabel	Indikator
Fungsi Sosial Budaya	
Menggambarkan ekspresi budaya lokal Kota Bandar Lampung	- Terdapat <i>design</i> kebudayaan lampung (misalnya adanya menara siger, atau lukisan-lukisan adat lampung)
Merupakan media komunikasi masyarakat kota	- Tempat berkumpul masyarakat - Tempat pertemuan informal - Bersosialisasi dengan masyarakat - Tempat bermain anak-anak
Sebagai tempat rekreasi	- Tempat olah raga (refleksi kesehatan, alat bantu pull up dan jogging track) - Tempat untuk bersantai dan <i>refreshing</i> keluarga
Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam	- Terdapat udara yang segar dan bersih - Dilengkapi dengan beraneka jenis pepohonan serta tanaman hias - Lingkungan atau bentang alam yang unik - Keanekaragaman plasma nutfah
Fungsi Estetika	
Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota	- Bentuk (<i>design</i>) dan warna yang bervariasi dengan penempatan tata ruang yang baik
Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota	- Terdapat tempat berkumpul - Terdapat sarana pendukung kreativitas dan produktivitas masyarakat
Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun	- Terdapat Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau - Ergonomis
Fungsi Ekologi	
Penyerap karbondioksida (CO ₂)	- Terdapat tumbuh-tumbuhan yang dapat menyerap gas karbondioksida (CO ₂)
Pelestarian air tanah	- Terdapat sumur resapan air
Penahan angin	- Terdapat tanaman penahan angin
Habitat hidupan liar	- Keanekaragaman binatang liar

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007.

Tabel 2. Faktor Prioritas Berdasarkan Fungsi RTH

Fungsi	Indikator Prioritas	Loading Factor
Sosial Budaya	- Adanya <i>design</i> kebudayaan Lampung	- 0,577
	- Dilengkapi dengan beraneka jenis pepohonan	- 0,702
	- Keanekaragaman plasma nutfah	- 0,773
	- Lingkungan atau bentang alam yang unik	- 0,717
Estetika	- Ergonomis	- 0,519
	- Terdapat sarana pendukung kreativitas dan produktivitas masyarakat	- 0,665
Ekologi	- Sumur resapan air	- 0,735

Pendapat Stakeholders

Pendapat *Stakeholders* untuk optimalisasi fungsi sosial budaya, estetika, dan ekologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Taman “Hutan Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung didapatkan dari hasil wawancara *stakeholders* yang terdiri dari birokrat dan tokoh masyarakat. Birokrat dari instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung (BAPPEDA, Dinas Kebersihan, dan Kantor Kecamatan). Data hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 3, dimana indikator yang menjadi prioritas *stakeholders* mengenai optimalisasi fungsi RTH sedikit berbeda dengan hasil wawancara dengan masyarakat.

Disamping pendapat tentang indikator yang harus diprioritaskan, maka juga ada harapan *stakeholders* agar fungsi RTH yang ingin dicapai dapat maksimal. Harapan ini menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan fungsi RTH di masa yang akan datang. Beberapa aspek yang menjadi harapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsep penataan dari Taman “Hutan Kota” Way Halim harus direncanakan sebaik mungkin. Perencanaan dan pemeliharaan yang dilakukan secara maksimal dapat menjawab permasalahan yang timbul serta memelihara kesatuan Hutan Kota Way Halim dari kerusakan pembangunan yang seharusnya tidak mengambil RTH, selain itu taman hutan kota ini juga dapat diarahkan sebagai tempat edukasi untuk masyarakat mempelajari alam yang ada di Taman Hutan Kota Way Halim. Jadi pemanfaatan ruang bagi kawasan Taman “Hutan Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung ini adalah sebagai kawasan konservasi, edukasi, dan rekreasi.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat Kecamatan Way Halim agar mengetahui betapa pentingnya RTH di suatu perkotaan dan adanya partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Masyarakat dapat berperan dengan

meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman misalnya dengan menanam tanaman dan membangun sumur resapan air serta pengelolaan sampah. Lahan pekarangan rumah dimanfaatkan secara optimal dengan berbagai jenis tanaman baik ditanam langsung maupun dalam media perantara seperti pot maupun media perantara lainnya. Sektor swasta juga dapat berperan menyediakan RTH pada fasilitas yang dibangun (mall, plaza, perumahan, dan sebagainya). Pemerintah menempatkan diri sebagai fasilitator dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

3. Konsistensi dari pemerintah terhadap zonasi RTH, agar tidak dialih fungsikan menjadi kawasan terbangun. Kendala realisasi RTH di Kota Bandar Lampung sama dengan kota-kota di Indonesia lainnya, yaitu sulitnya ruang bagi RTH. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menyadari apabila pemerintah tidak bisa memelihara dan merawat RTH semakin baik, maka pemerintah hendaklah mempertahankan lahan-lahan yang telah diatur dalam kebijakan sebagai lahan peruntukkan RTH bukan dijadikan sebagai lahan terbangun. Konsistensi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan RTH ini sangat diperlukan guna mempertahankan RTH di Kota Bandar Lampung, mengingat fungsi dan manfaat RTH yang sangat besar bagi perkotaan. Perangkat hukum mengatur penataan ruang hendaknya di implementasikan dengan baik oleh pengambil keputusan (Dwihatmojo, 2014).
4. Pemeliharaan dan perawatan Taman “Hutan Kota” Way Halim oleh instansi pemerintah terkait dengan RTH secara terkoordinasi. RTH khususnya Taman “Hutan Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung merupakan RTH yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan lebih yang berasal dari Pemerintah. Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan kerjasama antar sesama instansi untuk memelihara dan melakukan perawatan terhadap RTH, agar tercipta kondisi lingkungan yang baik. Melakukan koordinasi secara berkala dengan jajaran instansi yang mengelola RTH seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung serta instansi lain yang terkait dengan penanganan RTH.
5. Tindakan tegas dari instansi pemerintah terkait dengan masalah sengketa lahan. Fungsi Taman ‘Hutan Kota’ Way Halim di Kota Bandar Lampung tahun 2013-2030 adalah sebagai identitas kota yang dapat dijadikan sebagai simbol atau lambang suatu kota Bandar Lampung sendiri dengan pengkoleksi pada areal hutan kota misalnya pengembangan flora dan sebagai penyerap gas karbondioksida karena hutan kota ini berada di sebelah jalur lintas sumatera yang padat akan kendaraan yang melintas namun, berawal dari surat hak atas tanah yang di terbitkan pada 1 Februari 2010, HGB Nomor 44/HGB/BPN.18/2010. Melalui surat pemerintah memberikan hak kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB), untuk mengubah ‘Hutan Kota’ Way Halim, dari fungsi awalnya sebagai Ruang Terbuka Hijau menjadi perkantoran dan ruko. Kebijakan pemerintah kota ini menyalahi UU Nomor 26 Tahun 2007 yang mengharuskan setiap kota memiliki RTH sebesar minimal 30 persen dari total luas kota tersebut.

Tabel 3. Pendapat Stakeholders Untuk Optimalisasi Fungsi RTH.

Fungsi	Indikator Prioritas Masyarakat	Pendapat Stakeholder
Sosial Budaya	- Adanya design kebudayaan Lampung	Adanya pembuatan <i>design</i> kebudayaan Lampung sebagai ciri-ciri RTH, serta
	- Dilengkapi dengan beraneka jenis pepohonan lokal	penanaman beranekaragam pepohonan yang sesuai dan mempunyai waktu hidup yang lama.
	- Keanekaragaman plasma nutfah lokal	Menjadi tempat edukasi dan rekreasi
	- Lingkungan atau bentang alam yang unik	
Estetika	- Ergonomis	Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas penunjang kegiatan masyarakat sehingga masyarakat merasakan kenyamanan berada di Taman “Hutan Kota” Way Halim.
	- Terdapat sarana pendukung kreativitas dan produktivitas masyarakat	
Ekologi	- Sumur resapan air	Taman bisa menjadi kawasan konservasi Lahan masyarakat dapat dijadikan RTH privat yang mendukung ketersediaan RTH Kota Pembuatan sumur resapan air untuk menghindari air permukaan tergenang yang dapat menyebabkan banjir.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator prioritas untuk revitalisasi RTH publik di Kota Bandar Lampung bagi pengguna atau masyarakat berturut-turut adalah peningkatan fungsi sosial budaya (identitas budaya Lampung, pepohonan lokal, bentang alam), fungsi ekologi (kolam/sumur resapan) dan estetika (fasilitas yang ergonomis, pendukung produktivitas dan kreatifitas warga). Indikator tersebut hampir sama dengan hasil dari wawancara penyedia atau *stakeholders*. Bagi penyedia indikator prioritas dari fungsi sosial budaya adalah : adanya pembuatan *design* kebudayaan Lampung sebagai ciri-ciri RTH lokal, serta penanaman beranekaragam pepohonan yang sesuai



dan mempunyai waktu hidup yang lama, menjadi tempat edukasi dan rekreasi. Indikator untuk fungsi estetika adalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas penunjang kegiatan masyarakat sehingga masyarakat merasakan kenyamanan berada di Taman “Hutan Kota” Way Halim Bandar Lampung. Sedangkan untuk fungsi ekologi indikatornya adalah taman bisa menjadi kawasan konservasi, lahan masyarakat dapat dijadikan RTH privat yang mendukung ketersediaan RTH Kota serta pembuatan kolam atau sumur resapan air untuk menghindari air permukaan tergenang yang dapat menyebabkan banjir.

Fungsi-fungsi RTH yang telah di analisis tersebut hendaklah menjadi acuan apabila pemerintah jika ingin merevitalisasi RTH publik di Taman “Hutan Kota” Way Halim Kota Bandar Lampung. Selain itu, beberapa harapan *stakeholders* terkait kajian fungsi RTH ini juga dapat antara lain, adanya pengawasan RTH agar tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan pembangunan, pemeliharaan dan program pemanfaatan ruang terbuka hijau, penyuluhan dan pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat sekitar sebagai upaya melestarikan kawasan Hutan Kota Way Halim, konsistensi dari pemerintah terhadap zonasi RTH, agar tidak dialih fungsikan sebagai kawasan terbangun, pemeliharaan dan perawatan Taman “Hutan Kota” Way Halim oleh instansi pemerintah terkait dengan RTH secara terkoordinasi, serta adanya tindakan tegas dari instansi pemerintah terkait dengan masalah sengketa lahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Teman-teman sejawat di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera dan di Universitas Lampung. Seluruh *stakeholders* yang berkenan menjadi responden dan instansi pemerintah di Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan serta kemudahan dalam mendapatkan data-data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acha. (2005) Aplikasi Analisis Faktor Untuk Persamaan Simultan. Makasar. Albany, CA: Pacific Southwest Research Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Kota Bandar Lampung Dalam Angka. Kota Bandar Lampung.
- Carr Stephen, Mark Francis, Leane G, Rivlin, Andre M Stone. (1995) *Public Space*. Cambridge University. England.
- Dwihatmojo, R. (2004) Ruang Terbuka Hijau yang Semakin Terpinggirkan. Jogjakarta.
- Iguh. (2014) Pelaksanaan Peraturan RTH dalam RTRW Kota Metro. Vol 1 No 3: 10p.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007. (2007) Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Program Kotaku, (2018) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung
- Sutrisno H. (1984) *Statistik Jilid 1*. Yogyakarta.
- Trancik, R. (1986) *Finding Lost Space, Theories of Urban Design*. Van Nostrand Reinhold Company. New York.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. (2007) Tentang Penataan Ruang.
- Yamane, Taro. (1967) *Statistics An Introductory Analysis 2nd Edition*. New York.
- Yanti, Fitri. (2016) Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Lapangan Merah dan Pasar Seni, Lapangan Kalpataru dan Embung Sukarame/ Taman Kota. Thesis Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung.